

Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Di Universitas Negeri Surabaya

Yoggy Pratama¹, Zainal Fatah², Nihayatus Sholichah³, Ika Devy Pramudiana⁴

^{1, 2, 3, 4} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr Soetomo

Corresponding Author: Syifaudin, e-mail: yoggypratamaa@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRACT

The high cost of higher education in Indonesia remains a major obstacle for students from low-income families to continue their studies at universities. This condition prompted the government to launch the Indonesia Smart College Card Program (Kartu Indonesia Pintar Kuliah or KIP-K) as an affirmative policy aimed at expanding equitable and inclusive access to higher education. The program is designed to reduce financial burdens by providing tuition waivers and living allowances for economically disadvantaged students with strong academic potential. Universitas Negeri Surabaya (UNESA) is one of the state universities with the highest number of KIP-K recipients in Indonesia, making it a relevant setting to examine the program's effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of the KIP-K Program in fulfilling the educational needs of underprivileged students at UNESA and to identify its supporting and inhibiting factors. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and observations involving four informants: two KIP-K recipients and two non-recipients. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the KIP-K Program at UNESA is relatively effective based on Soetrisno's (2016) five indicators of effectiveness: program comprehension, goal attainment, target accuracy, timeliness, and tangible change. The program has positively influenced students' learning motivation, academic discipline, and financial independence. However, several challenges remain, including delayed fund disbursement, unequal dissemination of information, and insufficient monitoring of fund utilization. Strengthening the monitoring system, improving distribution mechanisms, and enhancing program outreach are recommended to ensure the program's sustainability and to promote equitable access to higher education in Indonesia.

Keywords: Effectiveness Program, Indonesia Smart Card, KIP, higher education

ABSTRAK

Tingginya biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi hambatan utama bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah meluncurkan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagai bentuk kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan tinggi yang merata dan inklusif. Program ini bertujuan meringankan beban biaya pendidikan melalui pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pemberian bantuan biaya hidup bagi mahasiswa kurang mampu yang memiliki potensi akademik. Universitas Negeri Surabaya (UNESA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri dengan jumlah penerima KIP-K terbanyak di Indonesia, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program KIP Kuliah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mahasiswa kurang mampu di UNESA serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap empat informan yang terdiri atas dua mahasiswa penerima KIP dan dua mahasiswa nonpenerima. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KIP Kuliah di UNESA tergolong efektif berdasarkan lima indikator efektivitas menurut Soetrisno

(2016), yaitu pemahaman program, pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan perubahan nyata. Program ini terbukti meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan akademik, serta kemandirian finansial mahasiswa penerima. Meskipun demikian, efektivitas program masih dihadapkan pada kendala berupa keterlambatan pencairan dana, ketimpangan sosialisasi, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan bantuan. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring, penyempurnaan mekanisme distribusi, serta peningkatan sosialisasi perlu dilakukan agar program ini dapat mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Kartu Pintar Indonesia, KIP, pendidikan tinggi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika global. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter serta penguatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat. Nikmah et al. (2020) menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menjadi fondasi pembangunan nasional. Akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan tinggi berkorelasi langsung dengan peningkatan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Dalam konteks globalisasi, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menyediakan pendidikan tinggi yang inklusif, terjangkau, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tingginya biaya pendidikan kerap menjadi penghambat utama bagi masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah di Indonesia, untuk mengakses pendidikan tinggi secara optimal. Kondisi ini menimbulkan urgensi intervensi kebijakan publik yang menjamin akses pendidikan

Gambar 1: Rata - Rata Biaya Pendidikan di Indonesia



Sumber 1: Website Databooks

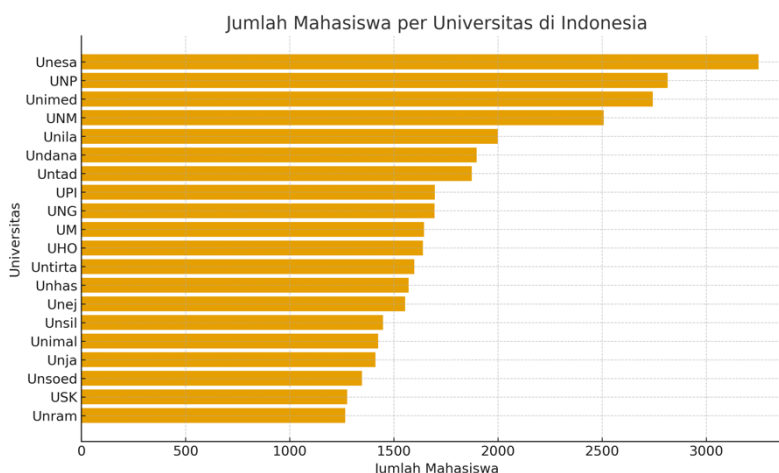
secara adil dan tanpa diskriminasi sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan pendidikan sebagai bentuk komitmen untuk mendorong pemerataan kesempatan

belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara bertanggung jawab menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara. Program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bidikmisi, hingga Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi wujud nyata upaya negara dalam menurunkan kesenjangan pendidikan. World Bank (2020) menegaskan bahwa kebijakan berbasis bantuan langsung kepada peserta didik terbukti efektif dalam mengurangi hambatan finansial dan meningkatkan partisipasi pendidikan, khususnya di jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) tahun 2024 yang tercantum dalam laporan Statistik Penunjang Pendidikan 2024 yang dikutip pada Badan Pusat Statistik (BPS), (Ridha Kusuma Perdana, 2025) jenjang pendidikan tinggi menunjukkan rata-rata biaya pendidikan tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Pada tahun ajaran 2023/2024, rata-rata total biaya pendidikan pada jenjang tersebut mencapai Rp19,01 juta per peserta didik, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan jenjang SMA/SMK sederajat yang rata-ratanya sebesar Rp10,19 juta. Adapun jenjang SMP sederajat memiliki rata-rata biaya sebesar Rp7,34 juta per peserta didik, sementara jenjang SD sederajat menunjukkan angka paling rendah, yakni sebesar Rp4,56 juta. Dalam konteks pendidikan tinggi, komponen biaya terbesar berasal dari pengeluaran untuk uang saku yang diperkirakan mencapai 35,13% dari total biaya, diikuti oleh Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 33,47%. Secara keseluruhan, biaya pendidikan yang dihitung dalam laporan tersebut mencakup berbagai komponen, antara lain uang pendaftaran, uang saku, biaya transportasi, serta biaya operasional lainnya, yang meliputi SPP atau UKT, seragam dan perlengkapannya, buku pelajaran, alat tulis, serta kebutuhan lain yang dikeluarkan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Salah satu kebijakan strategis dalam bidang pendidikan tinggi adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang merupakan program bantuan pembiayaan pendidikan bagi lulusan SMA/SMK atau sederajat yang memiliki potensi akademik namun menghadapi kendala ekonomi. Program ini dirancang untuk mendukung pembiayaan pendidikan secara menyeluruh, mencakup

Gambar 2 : UNESA Penerima Mahasiswa KIP Terbanyak



pembebasan biaya pendidikan, biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, serta bantuan biaya hidup selama masa studi. KIP-K tidak hanya menyasar pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP), tetapi juga peserta dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta individu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pelaksanaan program ini berlandaskan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan nasional, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pelaksanaan teknis program diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, dengan mekanisme seleksi berbasis data sosial-ekonomi yang terverifikasi untuk memastikan ketepatan sasaran (Safii & Amanda, 2023).

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang secara konsisten menempati posisi teratas sebagai penerima mahasiswa KIP Kuliah terbanyak secara nasional. Berdasarkan data dari SNPMB (2025), UNESA berhasil menerima 3.252 mahasiswa penerima KIP-K pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), menjadikannya kampus dengan jumlah penerima terbanyak selama tiga tahun berturut-turut sejak 2023. Total pendaftar KIP-K yang diterima di UNESA mencapai 4.239 mahasiswa, termasuk jenjang Sarjana (S1) dan Vokasi (D3/D4) (Imron Arlado, 2025). Tingginya angka tersebut mencerminkan pentingnya peran KIP-K dalam mendukung akses pendidikan tinggi di lingkungan UNESA dan menegaskan komitmen institusi terhadap prinsip inklusivitas dan pemerataan pendidikan.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tidak terlepas dari berbagai tantangan. Rohmah & Kasmawanto (2022) mengidentifikasi bahwa permasalahan sering muncul pada tahap implementasi, terutama dalam bentuk keterlambatan pencairan dana serta kesenjangan informasi antara pihak pengelola dan mahasiswa penerima. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa yang sepenuhnya bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Sejalan dengan hal itu, Asiska & Syabila (2025) menegaskan bahwa kendala juga dapat bersumber dari proses komunikasi yang kurang efektif serta dari sisi penerima manfaat sendiri. Menurut Mustarif et al. (2024) Faktor komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya menjadi faktor pendukung utama dalam kelancaran distribusi bantuan. Sebaliknya, tantangan utama muncul dari infrastruktur jalan yang buruk sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bantuan, serta masalah dalam pembaruan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, sebagian mahasiswa masih ditemukan tidak mematuhi aturan administratif, khususnya terkait ketepatan dalam pengumpulan berkas, sehingga berdampak pada kelancaran proses pencairan dan pemanfaatan dana secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas komunikasi,

manajemen pelaksanaan, serta kepatuhan penerima manfaat dalam menjalankan kewajiban administratif.

Penelitian yang dilakukan oleh Jasmelinda et al. (2025) dan Christy et al. (2024) mengindikasikan bahwa kebijakan KIP Kuliah yang diatur melalui peraturan terbaru juga membawa perubahan penting dalam cara penyaluran beasiswa, yang bertujuan untuk menjangkau mahasiswa yang secara finansial tidak mampu. Secara khusus, KIP Kuliah berfokus pada mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah, memberikan mereka akses tidak hanya ke pendidikan tinggi tetapi juga kepada kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka, yang pada gilirannya dapat membantu pengurangan kemiskinan. Berdasarkan analisis efektivitas KIP, nilai tinggi yang dicapai oleh penerima beasiswa KIP terhadap prestasi akademik menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan memberikan dorongan signifikan dalam motivasi belajar, seperti yang dijelaskan oleh HARYONO (2024) dan Mulyosaputro (2025) juga menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait pengelolaan dana KIP Kuliah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas distribusi beasiswa. Tidak hanya itu, terdapat isu terkait penerapan KIP yang tidak tepat sasaran. Penelitian oleh Sakinah dan Sakinah & Fithry (2024) mengungkapkan bahwa banyak penerima KIP yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria kebutuhan ekonomi, dan ini mengurangi efektivitas program secara keseluruhan. Hal ini menyoroti pentingnya penetapan kriteria penerima yang lebih ketat dan sistem pemantauan yang lebih baik untuk memastikan bahwa beasiswa mencapai yang benar-benar memerlukan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran KIP dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang dasar dan menengah (Nikmah et al., 2020; Purnama & Izzatusholekha, 2023). Temuan tersebut menegaskan kontribusi KIP dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi lemah. Namun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti efektivitas KIP-Kuliah dalam konteks pendidikan tinggi masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada capaian makro, seperti penurunan angka putus sekolah, sementara dimensi mikro terkait pengalaman mahasiswa penerima dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di perguruan tinggi masih jarang dieksplorasi. Dari perspektif sosial, pengaruh KIP-K terhadap motivasi mahasiswa juga menjadi area yang menarik untuk diteliti. Studi oleh Pratama & Ridho (2023) menunjukkan bahwa bantuan keuangan tidak hanya mereduksi beban finansial, tetapi juga meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi. Motivasi ini sangat penting agar tujuan utama dari program KIP-K dapat tercapai, yaitu menciptakan generasi yang lebih berpendidikan dan berdaya saing (Pratama & Ridho, 2023).

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian empiris yang berfokus pada efektivitas program KIP-Kuliah di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai fokus utama. Kajian ini diarahkan untuk mendalami persepsi mahasiswa penerima KIP-K terhadap efektivitas program

dalam mendukung keberhasilan pendidikan mereka. Penelitian semacam ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan literatur kebijakan pendidikan, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi perbaikan program dan kebijakan, baik di tingkat universitas maupun nasional. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peran KIP-K sebagai instrumen kebijakan yang inklusif, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan tinggi bagi Mahasiswa tidak mampu di Universitas Negeri Surabaya (UNESA)? (2) Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dalam program KIP terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan Mahasiswa tidak mampu di Universitas Negeri Surabaya. dan Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis peran program KIP dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan dari sudut pandang mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya.

Teori Efektifitas Program

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan organisasi yang pada umumnya dinilai melalui pencapaian tujuan. juga menegaskan bahwa efektivitas sering kali hanya dikaitkan dengan pencapaian tujuan semata, seperti laba, sementara aspek sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam keseluruhan proses justru terabaikan. Oleh karena itu, dalam penelitian efektivitas organisasi, perhatian terhadap perilaku dan peran sumber daya manusia harus ditempatkan sebagai fokus utama, karena peningkatan efektivitas pada dasarnya dimulai dari pemahaman perilaku manusia dalam sistem kerja. Selanjutnya, Soetrisno (2016) menyatakan bahwa efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat atau derajat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu program atau kegiatan berhasil memenuhi sasaran, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu. Dengan demikian, efektivitas dipandang sebagai salah satu dimensi produktivitas yang menekankan pencapaian target secara optimal.

Pada penelitian ini, efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Negeri Surabaya dianalisis berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Soetrisno (2016). Indikator ini menjadi acuan utama dalam menilai sejauh mana pelaksanaan maupun dampaknya terhadap peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa. Melalui indikator yang telah dikemukakan, penelitian ini berupaya menilai berdasarkan indikator efektivitas menurut (Soetrisno, 2016) yaitu:

1. Pemahaman program, sejauh mana mahasiswa memahami informasi, prosedur, dan manfaat KIP.
2. Tercapainya tujuan, diukur melalui peran KIP dalam meringankan beban biaya dan menunjang keberlangsungan studi mahasiswa.
3. Ketepatan sasaran, dilihat dari sejauh mana penerima KIP benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu sesuai dengan tujuan program.
4. Ketepatan waktu, berkaitan dengan pencairan dana yang sesuai jadwal dan kebutuhan mahasiswa.
5. Perubahan nyata, berupa dampak positif yang dirasakan mahasiswa penerima, baik dalam hal motivasi belajar, prestasi akademik, maupun keberlanjutan studi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai tepat untuk menggali realitas sosial berdasarkan perspektif dan pengalaman subjektif para informan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini berfokus pada interpretasi makna yang dibangun oleh mahasiswa penerima program dalam menjalani aktivitas akademik sehari-hari serta menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yakni di Universitas Negeri Surabaya, dengan pertimbangan bahwa institusi ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang secara aktif mengimplementasikan Program KIP Kuliah dan memiliki jumlah penerima manfaat yang cukup signifikan. Penentuan informan dilakukan secara purposif sampling dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Jumlah informan yang dilibatkan sebanyak empat orang, terdiri atas dua mahasiswa penerima KIP dan dua mahasiswa non-penerima KIP di Universitas Negeri Surabaya. Pemilihan dua mahasiswa penerima KIP didasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengalaman langsung dalam menjalani dan memanfaatkan program tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Data yang diperoleh dari informan ini diharapkan dapat menyajikan gambaran empiris mengenai efektivitas program dari sudut pandang penerima manfaat. Sementara itu, keberadaan satu mahasiswa nonpenerima KIP bertujuan sebagai pembanding, untuk memperoleh sudut pandang alternatif terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan tanpa dukungan program tersebut. Perbandingan ini penting untuk memperkuat analisis terhadap perbedaan pengalaman mahasiswa penerima dan nonpenerima KIP dalam menghadapi beban biaya pendidikan. Meskipun jumlah informan terbatas, pendekatan kualitatif lebih mengutamakan kedalaman data daripada kuantitas partisipan. Oleh karena itu,

wawancara dilakukan secara mendalam agar informasi yang diperoleh mampu merepresentasikan secara komprehensif efektivitas program KIP terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan mahasiswa.

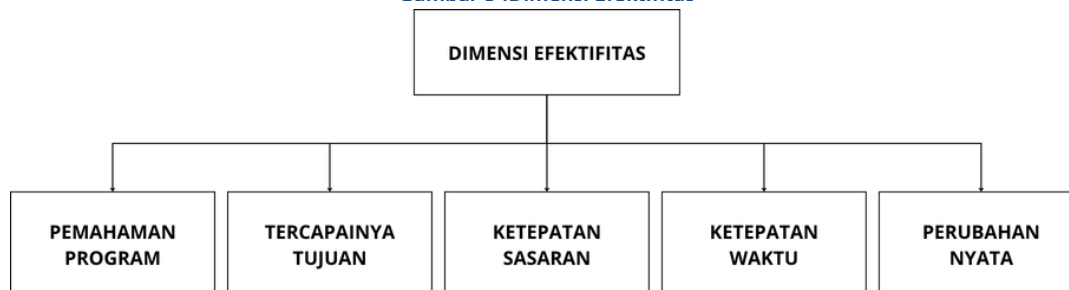
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kasus yaitu wawancara mendalam, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyaring informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data disusun secara naratif dan didukung oleh kutipan representatif yang membentuk tema-tema utama. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi pola makna, hubungan antar kategori, serta dimensi substantif dari pengalaman mahasiswa (Miles & Huberman, 1994). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta dilakukan konfirmasi hasil (member check) kepada informan guna meminimalkan kesalahan interpretatif. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, termasuk persetujuan sukarela dari informan, perlindungan terhadap identitas, serta penghormatan terhadap integritas informasi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu

Setelah melakukan wawancara dengan para informan yang terdiri dari mahasiswa penerima dan non-penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Negeri Surabaya, peneliti memperoleh berbagai temuan yang menggambarkan tingkat efektivitas program dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Pembahasan berikut akan

Gambar 3 :Dimensi Efektifitas



Sumber 2 : Olah Data Peneliti

menguraikan hasil penelitian tersebut berdasarkan lima indikator efektivitas menurut Soetrisno (2016), yaitu pemahaman program, tercapainya tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan perubahan nyata.

Pemahaman Program

Pemahaman mahasiswa terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi pada aspek tujuan, manfaat, dan pelaksanaan program. Mahasiswa penerima memahami bahwa KIP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Pemahaman terhadap tujuan dan manfaat program ini tercermin dari pandangan penerima yang menilai bahwa bantuan KIP tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan dorongan moral dan motivasional untuk menyelesaikan studi secara baik dan optimal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Udah jelas sih mas, karena semua ada di websitenya Kementerian Pendidikan yang bagian KIP. Selanjutnya juga kan aku dijejaskan sama guru di SMA aku, dan informasinya jelas serta mudah buat dipahami.” (Ter, penerima KIP, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerima tidak hanya memahami KIP sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang bertujuan memperluas akses dan pemerataan kesempatan belajar. Dengan demikian, indikator pertama penerima memahami tujuan dan manfaat program telah terpenuhi secara efektif. Efektivitas pemahaman juga tampak pada kemudahan akses dan pemahaman prosedur penerimaan serta pencairan dana. Mahasiswa penerima memperoleh informasi secara komprehensif melalui laman resmi Kementerian Pendidikan, portal universitas, serta media komunikasi daring. Salah seorang informan menyampaikan:

“Sudah jelas dan mudah dipahami semua sih termasuk syarat dan ketentuannya. Di internet, di media semua bisa digali dari situ.” (Nama, penerima KIP, 2025).

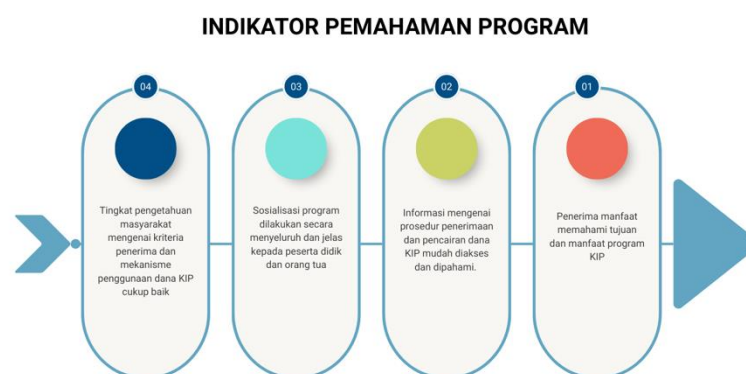
Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi program telah dirancang secara efisien dan transparan, sehingga mahasiswa mampu memahami mekanisme administrasi tanpa mengalami kendala berarti. Hal ini mengindikasikan terpenuhinya indikator kedua, yaitu kemudahan akses dan pemahaman terhadap prosedur program.

Selain itu, sosialisasi program yang dilakukan secara menyeluruh dan jelas kepada peserta didik serta orang tua juga berperan penting dalam memperkuat efektivitas pemahaman. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar penerima KIP telah memperoleh informasi sejak jenjang sekolah menengah atas melalui guru atau tenaga pendidik. Sosialisasi kemudian dilanjutkan di perguruan tinggi melalui laman resmi universitas, kegiatan orientasi mahasiswa, dan forum akademik. Pola penyampaian informasi yang berlapis ini memastikan kontinuitas pengetahuan dari tahap awal pendaftaran hingga proses pencairan dana, sekaligus memperkuat indikator ketiga mengenai kejelasan dan keluasan sosialisasi program.

Sementara itu, dari segi tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kriteria penerima dan mekanisme penggunaan dana, hasil temuan menunjukkan bahwa mahasiswa penerima memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap aturan dan batasan penggunaan bantuan. Penerima mengetahui bahwa dana KIP diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan seperti pembelian perlengkapan kuliah, transportasi, dan kebutuhan akademik lainnya. Pengetahuan tersebut terbentuk dari sosialisasi, pengalaman langsung, serta akses terhadap panduan resmi yang diterbitkan oleh pihak universitas dan kementerian. Hal ini membuktikan bahwa indikator keempat telah terpenuhi, di mana penerima tidak hanya memahami mekanisme administrasi, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab penggunaan dana secara tepat guna.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi Nikmah et al. (2020) yang menegaskan bahwa efektivitas program bantuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman penerima terhadap isi dan mekanisme kebijakan. Akses informasi yang jelas serta sosialisasi yang sistematis mampu meningkatkan pemanfaatan bantuan secara tepat sasaran. Selaras dengan pandangan Santoso (2023), pemahaman program juga memiliki implikasi terhadap peningkatan stabilitas psikologis dan kepatuhan administratif mahasiswa penerima. Dengan demikian, efektivitas pemahaman dalam Program KIP di UNESA telah tercapai secara optimal melalui integrasi antara kejelasan informasi, keterjangkauan prosedur, intensitas sosialisasi, dan kedalaman pengetahuan penerima terhadap mekanisme program. Secara keseluruhan.

Gambar 4 : Indikator Pemahaman Program



Sumber 3 : Olah Data Penditi

dimensi pemahaman program pada implementasi KIP di UNESA dapat dikategorikan efektif karena memenuhi keempat indikator utama, yaitu:

1. penerima memahami tujuan dan manfaat program.
2. prosedur penerimaan dan pencairan dana mudah diakses serta dipahami.
3. sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dan jelas.
4. penerima memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai kriteria dan mekanisme penggunaan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pemahaman berperan

penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan efektivitas pelaksanaan Program KIP di lingkungan perguruan tinggi.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan dimensi penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan suatu program, karena keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh tercapainya tujuan umum, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang berhak menerima manfaat. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara normatif dirancang untuk membantu mahasiswa dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah agar dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KIP di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah berjalan dengan cukup tepat sasaran. Hal ini tercermin dari pernyataan salah seorang informan yang menyampaikan bahwa,

“Udah tepat sih, karena ada juga banyak temenku yang dia dari keluarga yang nggak mampu dan dapat akses ke program KIP.” (Informan penerima KIP, 2025).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penerima program sebagian besar berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, sehingga menunjukkan terpenuhinya indikator pertama, yaitu penerima KIP berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah sesuai kriteria yang ditetapkan. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh informan lain,

“Tepat sasaran, ya. Karena stahuku banyak anak UNESA yang dari kalangan keluarga kurang mampu bisa kuliah di sini.” (Informan penerima KIP, 2025).

Selain kesesuaian kondisi sosial ekonomi penerima, indikator kedua juga terpenuhi melalui mekanisme verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara objektif. Berdasarkan hasil penelusuran, proses seleksi penerima KIP dilakukan melalui sistem terintegrasi antara sekolah asal, universitas, dan Kementerian Pendidikan. Proses tersebut mencakup pemeriksaan dokumen penghasilan orang tua, kepemilikan aset, serta status dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Prosedur berbasis data daring ini meminimalkan potensi kesalahan verifikasi dan memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi kriteria ekonomi yang telah ditentukan.

Meskipun terdapat beberapa laporan mengenai mahasiswa yang secara kasat mata tampak berasal dari keluarga mampu, hasil wawancara memperlihatkan bahwa kasus tersebut bersifat minor dan tidak signifikan terhadap keseluruhan pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan terpenuhinya indikator ketiga, yakni tidak terdapat penerima bantuan yang secara signifikan tidak memenuhi syarat meskipun ditemukan beberapa kasus minor di lapangan. Selanjutnya, indikator keempat mengenai distribusi bantuan juga telah dijalankan secara efektif. Penyaluran kartu dan dana KIP dilakukan melalui mekanisme resmi antara universitas, bank mitra, dan Kementerian

Pendidikan. Dana disalurkan langsung ke rekening mahasiswa penerima, dengan sistem pengawasan yang transparan dan terjadwal. Informasi mengenai proses pencairan dan penggunaan dana juga disebarluaskan melalui laman resmi universitas, sehingga penerima dapat memahami mekanisme penyaluran secara jelas dan akuntabel.

Gambar 5 : Indikator Ketepatan Sasaran



Sumber 4 : Olah Data Penditi

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Negeri Surabaya dapat dikategorikan cukup efektif dalam aspek ketepatan sasaran, karena memenuhi keempat indikator utama, yaitu:

1. penerima berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah;
 2. mekanisme verifikasi dan validasi data dilakukan secara objektif;
 3. tidak terdapat penerima bantuan yang secara signifikan tidak memenuhi syarat; dan
 4. distribusi kartu serta dana disalurkan kepada mahasiswa yang berhak menerima.
- Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ketepatan sasaran berperan penting dalam memastikan keadilan distribusi, transparansi pelaksanaan, serta keberlanjutan efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lingkungan perguruan tinggi.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam penyaluran dana Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program, karena berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan studi mahasiswa dan stabilitas ekonomi penerima. Penyaluran yang tepat waktu memastikan mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan akademik maupun biaya hidup tanpa gangguan, sementara keterlambatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan hambatan dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas mahasiswa penerima KIP di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menyatakan bahwa dana bantuan umumnya disalurkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak universitas dan lembaga penyalur. Salah seorang penerima mengungkapkan:

“Sedara ini cairnya udah sesuai jadwal sih, biasanya tiap semester ada pemberitahuan dari kampus dulu sebelum masuk kerkening. Jadi udah bisa diprediksi kapan waktunya.” (Tere, penerima KIP, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana telah berjalan dengan tingkat ketepatan waktu yang cukup tinggi. Mahasiswa memperoleh informasi resmi melalui sistem akademik universitas dan media komunikasi daring, sehingga proses pencairan dapat diantisipasi dengan baik. Namun demikian, sebagian kecil penerima melaporkan adanya penundaan teknis yang bersifat insidental, terutama pada awal semester ketika terjadi pembaruan sistem administrasi. Seorang informan menuturkan:

“Perah sih agak telat, waktu itu sistemnya diubah, jadi dana masuknya mundur beberapa minggu. Tapi biasanya dikasih info juga dari kampus, jadi masih bisa ditunggu.” (Nana, penerima KIP, 2025).

Keterangan ini menggambarkan bahwa meskipun proses pencairan dana umumnya berjalan tanpa penundaan berarti, tetap terdapat potensi keterlambatan yang disebabkan oleh faktor administratif, bukan oleh kebijakan program. Dalam konteks ini, sekolah dan pihak universitas telah melaksanakan pendistribusian sesuai waktu yang direncanakan, dengan koordinasi yang cukup baik antara lembaga pelaksana di tingkat pusat dan perguruan tinggi. Dari hasil observasi lapangan, keterlambatan yang terjadi dapat dikategorikan minor dan tidak berdampak signifikan terhadap keberlangsungan studi mahasiswa. Pihak pelaksana program juga dinilai telah berupaya meminimalkan keterlambatan penyaluran melalui peningkatan komunikasi dan sistem digitalisasi pencairan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan efisiensi penyaluran bantuan pendidikan.

Dalam kerangka teori efektivitas menurut Soetrisno (2016), ketepatan waktu merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi program, karena berhubungan dengan kepastian dan kontinuitas layanan terhadap penerima manfaat. Ketika dana disalurkan tepat waktu, mahasiswa dapat merencanakan pengeluaran akademik secara lebih teratur dan menghindari gangguan terhadap aktivitas perkuliahan. Temuan penelitian ini juga konsisten dengan hasil studi Rohmah dan Kasmawanto (2022) yang menyebutkan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan pendidikan sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga serta kejelasan mekanisme administrasi. Dalam konteks UNESA, keterpaduan antara universitas, lembaga penyalur, dan sistem akademik telah mendukung realisasi pencairan dana sesuai dengan jadwal.

Gambar 6 : Indikator Ketepatan Waktu



Sumber 5 : Olah Data Penditi

Secara keseluruhan, aspek ketepatan waktu pelaksanaan Program KIP di Universitas Negeri Surabaya dapat dikategorikan efektif, karena memenuhi keempat indikator utama, yaitu:

1. Dana KIP disalurkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Proses pencairan dana berjalan tanpa penundaan yang berarti.
3. Sekolah dan pihak terkait melaksanakan pendistribusian sesuai waktu yang direncanakan.
4. Keterlambatan penyaluran dapat diminimalkan oleh pihak pelaksana program.

Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program, karena mencerminkan sejauh mana kebijakan tidak hanya memberikan bantuan administratif atau finansial, tetapi juga menghasilkan dampak substantif terhadap penerima manfaat. Dalam konteks Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), temuan penelitian menunjukkan bahwa program ini tidak hanya membantu meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar, kedisiplinan akademik, serta kesadaran sosial mahasiswa penerima.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerima KIP umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses penentuan penerima dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data yang melibatkan koordinasi antara sekolah asal, universitas, dan Kementerian Pendidikan. Hal ini memastikan bahwa bantuan diberikan secara objektif kepada mahasiswa yang benar-benar memenuhi syarat. Distribusi kartu dan dana KIP juga telah disalurkan secara tepat kepada mahasiswa yang berhak menerima, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran utama. Seorang informan penerima menyampaikan bahwa bantuan KIP memiliki dampak signifikan terhadap semangat dan kedisiplinan belajar:

“KIP ini memangaruhi banget motivasiku di perkuliahan, karena kita kan sebagai penerima dituntut buat dapat IPK bagus minimal 3,00. Pemberian KIP ini juga cuma sampai 8 semester aja, jadi mau nggak mau harus rajin belajar dan ikut kelas biar IPK nggak turun.” (Tere, penerima KIP, 2025).

Hal tersebut dikuatkan oleh penerima lain yang menjelaskan bahwa KIP menjadi dorongan untuk berprestasi:

“Sangat memangaruhi karena kita harus dapat IPK yang bagus, minimal 3,00. Jadi harus sering belajar, baca buku, ngerjain tugas, nggak boleh males biar cepet lulus juga. KIP cuma sampai semester 8 aja, selebihnya bayar sendiri.” (Nana, penerima KIP, 2025).

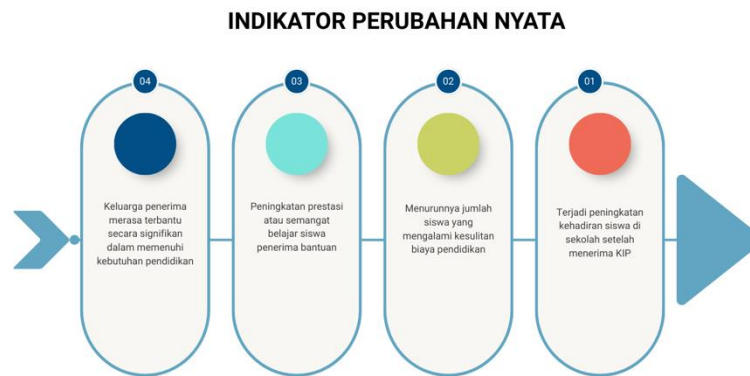
Selain itu, pengamatan mahasiswa non-penerima juga mendukung temuan bahwa penerima KIP menunjukkan perilaku akademik yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

“Kebanyakan dari mereka giat banget kuliahnya, kayak selalu ikut kelas, mungkin karena ada tuntutan agar nilainya bagus terus. Soalnya KIP ini stahuku cuma sampai 8 semester, jadi biar cepet lulus.” (Harid, non-penerima KIP, 2025).

Temuan tersebut menegaskan bahwa Program KIP memiliki efek ganda (double impact). Secara finansial, bantuan ini meringankan beban ekonomi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah melalui subsidi biaya pendidikan dan dukungan kebutuhan akademik dasar. Secara non-finansial, program ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, motivasi berprestasi, serta disiplin akademik yang lebih tinggi. Perubahan nyata tersebut mencakup dimensi material dan psikososial, yang keduanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja akademik mahasiswa penerima.

Menurut Soetrisno (2016), efektivitas suatu program sosial tidak hanya diukur dari pencapaian target administratif, tetapi dari sejauh mana program mampu menghasilkan real change yang mencerminkan keberhasilan dalam mencapai output (hasil langsung) dan outcome (hasil jangka panjang). Dalam konteks ini, KIP terbukti tidak hanya memenuhi aspek administratif seperti ketepatan sasaran penerima dan distribusi dana, tetapi juga menghasilkan dampak sosial berupa peningkatan motivasi, etos kerja, dan prestasi akademik. Temuan ini sejalan dengan Santoso (2023) yang menegaskan bahwa KIP berperan dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, meskipun penelitian tersebut berfokus pada aspek psikologis di masa pandemi. Penelitian ini memperluas pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa perubahan nyata juga meliputi peningkatan kesadaran akademik, keaktifan dalam perkuliahan, serta tanggung jawab untuk menyelesaikan studi tepat waktu.

Gambar 7 : Indikator Perubahan Nyata



Sumber 6 : Olah Data Penditi

Secara keseluruhan, dimensi perubahan nyata dalam implementasi Program KIP di UNESA dapat dikategorikan efektif, karena memenuhi indikator utama sebagai berikut:

1. Penerima KIP berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah sesuai kriteria.
2. Mekanisme verifikasi dan validasi data penerima dilakukan secara objektif.
3. Tidak terdapat penerima bantuan yang secara signifikan tidak memenuhi syarat, meskipun ditemukan beberapa kasus minor di lapangan.
4. Distribusi kartu dan dana tepat kepada mahasiswa yang berhak menerima.

Tercapainya Tujuan

Tujuan utama Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah memastikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan studi tanpa terbebani oleh persoalan biaya. Berdasarkan hasil wawancara, program ini dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meringankan beban finansial mahasiswa penerima, sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses akademik dan pencapaian prestasi belajar. Salah satu penerima menjelaskan bahwa bantuan KIP berperan besar dalam memenuhi kebutuhan kuliah dan kehidupan sehari-hari:

“Semua diringankan KIP, termasuk kalau ada kebutuhan kuliah yang harus dibi. Semua terpenuhi, misalnya buat ngprint, ngjilid, dan lain-lain. Dengan uang dari program sebesar Rp7.500.000 per semester, artinya sekitar Rp1,2 juta per bulan, itu masih aman lah. Jadi nggak perlu minta orang tua lagi, sudah cukup.” (Tere, penerima KIP, 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain:

“KIP ini sangat membantu banget, karena uangnya bisa buat kebutuhan kuliah, makan, dan keperluan lain. Jadi untuk mahasiswa KIP uang segitu cukup buat kebutuhan selama kuliah, dan nggak perlu lagi membebani orang tua.” (Nana, penerima KIP, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KIP telah mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi hambatan ekonomi mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi. Bantuan ini tidak

hanya mencakup pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga menyediakan dana tambahan untuk mendukung kegiatan akademik dan kebutuhan hidup dasar seperti buku, transportasi, serta biaya harian. Bahkan bagi sebagian mahasiswa, keberadaan KIP menjadi faktor penentu yang memungkinkan mereka untuk tetap berkuliah.

Lebih lanjut, hasil wawancara dan observasi menunjukkan beberapa perubahan positif yang menandakan tercapainya tujuan program secara substansial. Pertama, terjadi peningkatan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan setelah menerima bantuan, karena tidak lagi terbebani pekerjaan sampingan untuk memenuhi biaya pendidikan. Kedua, jumlah mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan studi menurun secara signifikan, yang ditunjukkan dengan berkurangnya kasus mahasiswa menunggak pembayaran UKT atau berhenti kuliah karena faktor ekonomi. Ketiga, semangat belajar dan prestasi akademik mahasiswa penerima mengalami peningkatan, karena adanya tuntutan untuk mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 sebagai salah satu syarat keberlanjutan bantuan. Keempat, keluarga penerima merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, karena dana bantuan mampu menggantikan sebagian besar biaya yang sebelumnya menjadi beban keluarga.

Indikator-indikator tersebut memperkuat kesimpulan bahwa program KIP telah memberikan dampak nyata terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Menurut teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Soetrisno (2016), pencapaian tujuan (goal achievement) merupakan inti dari efektivitas, yang ditandai oleh kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan sasaran yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, KIP terbukti efektif dalam mencapai sasaran pemerataan akses pendidikan tinggi, karena sebagian besar penerima mampu melanjutkan studi, meningkatkan kehadiran, serta menunjukkan motivasi dan prestasi akademik yang lebih baik. Meskipun demikian, efektivitas program masih perlu diperkuat dari segi kecukupan nominal bantuan. Salah satu penerima menyampaikan bahwa dana yang diterima cenderung pas-pasan untuk biaya hidup di kota besar:

“Mungkin jangan sampai dikurangi lah uang KIP yang Rp7.500.000 itu, karena menurutku sebagai mahasiswa UNESA yang tinggal di Surabaya, pengeluaran per bulan sekitar Rp1,2 juta itu pas banget buat makan, bayar kos, dan kebutuhan lain. Kalau bisa malah ditambah, karena setiap tahun ada inflasi juga.” (Tere, penerima KIP, 2025).

Kritik tersebut menunjukkan perlunya evaluasi periodik terhadap besaran bantuan agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan biaya hidup mahasiswa di berbagai wilayah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nikmah et al. (2020) yang menegaskan bahwa KIP berperan penting dalam menekan hambatan finansial pendidikan, meskipun kecukupan dana masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Sementara itu, Purnama dan Izzatusholekha (2023) menambahkan bahwa efektivitas

program bantuan pendidikan akan lebih optimal apabila disertai mekanisme evaluasi berkala terhadap besaran dana, waktu penyaluran, dan sistem distribusinya.

Gambar 8 : Indikator Tercapainya Tujuan

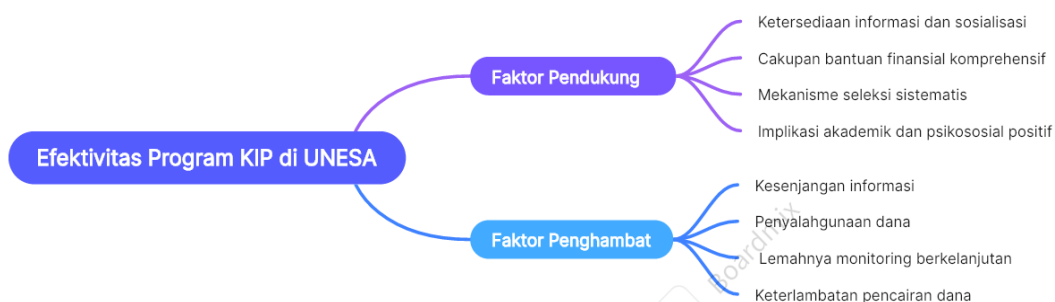


Secara keseluruhan, efektivitas Program KIP di Universitas Negeri Surabaya pada aspek tercapainya tujuan dapat dikategorikan tinggi, karena memenuhi beberapa indikator utama, yaitu:

1. Terjadi peningkatan kehadiran mahasiswa dalam kegiatan akademik setelah menerima bantuan.
2. Menurunnya jumlah mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.
3. Meningkatnya prestasi dan semangat belajar mahasiswa penerima KIP.
4. Keluarga penerima merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan mahasiswa

Gambar 9 : Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas



Sumber: Olah Data Peneliti

Efektivitas suatu program kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam proses implementasinya. Dalam konteks Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Negeri Surabaya, faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan sejauh mana program mampu menjawab kebutuhan pendidikan mahasiswa kurang mampu. Menurut Soetrisno (2016)), efektivitas program dapat diukur dari lima indikator, yaitu pemahaman program, tercapainya tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan perubahan nyata.

Berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Faktor Pendukung

1. Pertama, ketersediaan informasi dan sosialisasi program menjadi faktor utama yang mendorong mahasiswa memahami mekanisme, prosedur, serta tujuan program. Akses informasi yang memadai melalui website resmi Kementerian Pendidikan maupun sosialisasi dari sekolah dan universitas menciptakan tingkat pemahaman yang baik pada kelompok penerima.
2. Kedua, mekanisme seleksi yang relatif sistematis juga mendukung tercapainya efektivitas program. Proses verifikasi data ekonomi, pemeriksaan dokumen, hingga survei lapangan berfungsi memastikan bantuan tepat sasaran, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kelemahan.
3. Ketiga, cakupan bantuan finansial yang komprehensif turut menjadi faktor pendukung. Dengan ditanggungnya biaya UKT dan sebagian kebutuhan akademik, mahasiswa penerima dapat melanjutkan studi tanpa terbebani masalah ekonomi keluarga. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga meningkatkan fokus dan motivasi mahasiswa dalam proses belajar.
4. Keempat, implikasi akademik dan psikososial yang muncul dari adanya KIP juga menjadi penunjang. Mahasiswa penerima terdorong untuk menjaga IPK minimal 3,00 sehingga menumbuhkan kedisiplinan, keaktifan akademik, serta partisipasi dalam kegiatan organisasi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nyata pada perilaku mahasiswa, yang sejalan dengan indikator efektivitas program.

Selain itu, dukungan fasilitas kampus seperti perpustakaan dan akses internet turut memperkuat peran KIP dalam menunjang proses pendidikan, karena dana bantuan dapat dialokasikan secara lebih efisien untuk kebutuhan akademik lain.

Faktor Penghambat

1. Keterlambatan pencairan dana menjadi kendala paling krusial karena berdampak langsung pada keberlangsungan pendidikan mahasiswa. Misalnya, pada awal semester mahasiswa biasanya dihadapkan pada kewajiban membayar biaya kuliah, membeli buku, maupun memenuhi kebutuhan akademik lainnya. Jika dana tidak cair tepat waktu, mahasiswa dari keluarga kurang mampu terpaksa mencari pinjaman atau menunda pembayaran biaya kuliah. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis, mengganggu fokus belajar, serta berpotensi menghambat kelancaran proses studi.
2. Tidak meratanya sosialisasi program menyebabkan sebagian mahasiswa memiliki pemahaman yang minim tentang prosedur, syarat, maupun mekanisme program KIP. Akibatnya, muncul

kesalahpahaman di kalangan mahasiswa non-penerima, misalnya anggapan bahwa program ini tidak transparan atau hanya menguntungkan pihak tertentu. Stigma negatif terhadap penerima juga dapat terjadi, seperti dianggap mendapat “kemudahan” tanpa usaha yang sepadan. Kesenjangan informasi ini pada akhirnya menurunkan citra positif program serta mengurangi kepercayaan mahasiswa terhadap kebijakan pendidikan pemerintah.

3. Meskipun dana KIP bertujuan utama untuk mendukung kebutuhan akademik, kenyataannya terdapat mahasiswa yang tidak sepenuhnya memanfaatkannya sesuai peruntukan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar biaya kuliah, membeli buku, atau menunjang kegiatan akademik, justru digunakan untuk kebutuhan non-esensial seperti konsumsi gaya hidup. Penyalahgunaan dana semacam ini melemahkan efektivitas program karena tujuan utamanya mendukung keberlanjutan pendidikan mahasiswa kurang mampu—tidak tercapai secara optimal. Selain itu, praktik ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas program.
4. Monitoring yang dilakukan terhadap penerima program KIP masih bersifat terbatas dan kurang berkesinambungan. Pengawasan biasanya hanya dilakukan pada saat seleksi awal, sedangkan setelah mahasiswa menjadi penerima, evaluasi mengenai kondisi ekonomi maupun penggunaan dana seringkali tidak intensif. Akibatnya, masih ada penerima yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria ekonomi tetapi tetap menikmati bantuan, serta penggunaan dana yang tidak tepat sasaran tidak dapat terpantau dengan baik. Lemahnya monitoring ini berimplikasi pada berkurangnya efektivitas program dan berpotensi menurunkan legitimasi kebijakan di mata mahasiswa dan masyarakat luas.

Jika dianalisis secara konseptual, faktor-faktor pendukung menunjukkan bahwa Program KIP telah berkontribusi nyata dalam menekan hambatan struktural mahasiswa kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Namun, keberadaan faktor penghambat memperlihatkan adanya masalah klasik dalam implementasi kebijakan publik, yakni lemahnya koordinasi administratif, ketidaktepatan sasaran, serta minimnya monitoring. Hal ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Dengan demikian, efektivitas Program KIP di Universitas Negeri Surabaya dapat dikatakan relatif berhasil dalam membantu mahasiswa kurang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, tetapi efektivitasnya masih bersifat parsial. Upaya penguatan transparansi informasi, ketepatan waktu pencairan, serta mekanisme verifikasi dan monitoring berkelanjutan diperlukan agar program ini dapat mencapai tujuan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

KE Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Negeri Surabaya telah berjalan dengan cukup efektif dalam membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi. Bantuan yang diberikan, baik berupa pembebasan biaya kuliah maupun dana biaya hidup, terbukti mampu meringankan beban ekonomi mahasiswa sehingga mereka dapat berfokus pada kegiatan belajar dan pengembangan diri. Mahasiswa penerima juga memahami dengan baik tujuan, manfaat, serta prosedur program karena adanya sosialisasi yang jelas dari sekolah, universitas, dan pihak kementerian. Proses verifikasi data yang ketat memastikan bantuan tepat sasaran kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, penyaluran dana berjalan relatif tepat waktu, meskipun sesekali mengalami kendala teknis yang tidak berdampak besar terhadap aktivitas akademik. Program ini juga membawa dampak positif terhadap peningkatan motivasi belajar, kedisiplinan, dan semangat berprestasi mahasiswa penerima, yang menunjukkan bahwa KIP Kuliah tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan tanggung jawab akademik. Meski demikian, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Beberapa mahasiswa mengalami keterlambatan pencairan dana, sementara sosialisasi program belum merata di seluruh kalangan mahasiswa. Selain itu, masih ditemukan kasus penggunaan dana yang kurang sesuai dengan tujuan program serta lemahnya pengawasan berkelanjutan terhadap penerima. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan pihak universitas untuk memperkuat sistem monitoring, memperjelas informasi, dan memastikan ketepatan waktu penyaluran agar manfaat program dapat dirasakan lebih maksimal. Mahasiswa penerima juga diharapkan dapat menggunakan dana secara bijak dan berorientasi pada kebutuhan akademik agar bantuan ini benar-benar berkontribusi terhadap keberhasilan studi. Dengan peningkatan pada aspek pengawasan dan pendampingan, Program KIP Kuliah berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Negeri Surabaya telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mendukung mahasiswa kurang mampu, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah saran yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya maupun bagi instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas program ini, yakni :

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, mencakup beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di berbagai daerah. Pendekatan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan implementasi dan

dampak program di berbagai konteks sosial ekonomi. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat menggabungkan metode kuantitatif dengan kualitatif agar hasil yang diperoleh tidak hanya menggambarkan persepsi mahasiswa, tetapi juga mampu mengukur pengaruh program terhadap capaian akademik dan kesejahteraan penerima secara lebih objektif.

2. Untuk instansi terkait, baik pemerintah maupun perguruan tinggi, disarankan untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Program KIP Kuliah. Pemerintah perlu meninjau kembali besaran dana bantuan agar sesuai dengan biaya hidup di masing-masing wilayah, serta memastikan penyaluran dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Perguruan tinggi diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, serta pelaporan penggunaan dana agar penerima memahami tanggung jawabnya dan memanfaatkan bantuan secara optimal. Langkah-langkah tersebut akan mendukung terciptanya pelaksanaan program yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Christy, E. N., Latifa, R., Purwatitisari, N., Prabowo, P. A. R., & Harmawan, B. N. (2024). Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 9(2), 134–141. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v9i2.3059>
- HARYONO, E. K. O. (2024). Analisis Pengaruh Beasiswa Kip Terhadap Prestasi Mahasiswa Iai Al Muhammad Cepu Dengan Pendekatan Variabel Dummy. *Riemann Research of Mathematics and Mathematics Education*, 6(2), 35–43. <https://doi.org/10.38114/y5tj1y42>
- Imron Arlado. (2025, May 29). Unesa Tiga Kali Berturut Tempat Posisi Pertama, Berikut Daftar 20 PTN Penerima Mahasiswa KIP Kuliah Terbanyak di SNBT 2025. PT Mojokerto Intermedia Pers Jl R A Basuni No 96 Jampirogo Sooko Mojokerto 61361.
- Ishak, D. (2021). Menciptakan Kebijakan Pendidikan Yang Lebih Baik Di Indonesia. *PapatingJurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan Dan Pditik*, 4(2), 53–59. <https://doi.org/10.54783/japp.v4i2.513>
- Jusmelinda, S, R. R., & Barisan. (2025). Efektivitas Penerapan Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Program KIP Kuliah Di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. *Inovasi Gldal Jurnal*, 3(6), 1013–1028. <https://doi.org/10.58344/jig.v3i6.352>
- Lestari, R. A. (2021). Penguatan Kebijakan Pemberdayaan Sosial E konomi Rakyat Era New Normal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Pditik*, 1(1). <https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1563>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: A n expanded sourcebook*. sage.
- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2022). Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 258. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336>
- Mulyosaputro, P. (2025). Evaluasi Pengelolaan Dana Kip Kuliah: Peran Inspektorat Jenderal Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Di Pendidikan Islam. *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(1), 221–243. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v13i1.6226>
- Mustarif, R., Pramudiana, I. D., & Haryati, E. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan Pada Sektor Pendidikan. *SotomA dministrasi Publik*, 2(2), 351–364.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 72. <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.581>

- Pratama, Ri. A., & Ridho, W. F. (2023). KIP-K: Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 559–563. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1392>
- Purnama, R., & Izzatusholekha, I. (2023). Analisis Program Indonesia Pintar Dalam Mengurangi Putus Sekolah Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 5(1), 66–73. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.600>
- Ridha Kusuma Perdana. (2025, June 11). Data Rata-rata Total Biaya Pendidikan di Indonesia Menurut Jenjang Pendidikan pada TA 2023/2024. *DataIndonesia.Id*.
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 85–104.
- Safii, M., & Amanda, A. (2023). Optimisasi Algoritma MOOSRA Pada Seleksi Penerima Beasiswa KIP Kuliah. *Jurnal Saintikom (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 22(2), 555. <https://doi.org/10.53513/jis.v22i2.9459>
- Sakinah, R. A. W. S., & Fithry, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Dan Tanggung Jawab Universitas Dalam Penyaluran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Yang Tidak Tepat Sasaran. *Snapp*, 2(1), 53–62. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3121>
- Santoso, A. M. (2023). Hardiness Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, Universitas “X” Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Empati*, 12(6), 433–440. <https://doi.org/10.14710/empati.2023.31585>
- Saputra, R. F., Rahmadhani, O. K., Hikmayanti, N. S., Amelia, F., Rosyada, A. D., & Nugraha, J. T. (2025). Kontribusi Program KIP-K Terhadap Peningkatan Motivasi Dan Sikap Belajar Mahasiswa Di Universitas Tidar. *Jurnal Iso Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2637>
- Sarjito, A. (2024). Memahami Dinamika Administrasi Publik Dan Implementasi Kebijakan. *Saraqopat*, 5(2), 76–88. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i2.670>
- Soetrisno, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.” *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 225.